

BAB I PENDAHULUAN

Pembangunan yang dilaksanakan selama tiga dekade belakangan ternyata belum mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama yang berdiam di daerah pedesaan. Terjadinya kesenjangan antara daerah pedesaan dan perkotaan disebabkan karena bias dan distorsi pembangunan yang lebih banyak berpihak kepada ekonomi perkotaan. Akibatnya adalah timbul daerah-daerah tertinggal yang miskin dan terkebelakang. Menurut Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (2007), di Indonesia terdapat 32.379 kategori desa tertinggal, yang terdiri atas 29.634 berkategori tertinggal dan 2.745 berkategori sangat tertinggal.

Daerah-daerah tertinggal ini sulit untuk ditingkatkan kesejahteraannya karena selain pembangunan yang selama ini distortif juga karena masyarakat pedesaan tersebut berada dalam posisi yang tidak menguntungkan seperti pendidikan dan keterampilan yang rendah, tidak ada modal usaha, tidak punya tanah atau luasnya yang tidak layak, dan lain-lain. Di samping itu, masyarakat daerah tertinggal relatif terisolir dengan jumlah penduduk yang relatif jarang sehingga potensinya untuk berkembang menjadi terhambat. Fakta tentang desa tertinggal oleh Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (2008) menyebutkan bahwa jumlah desa yang belum dapat dilalui mobil adalah sebanyak 9.425 desa, yang belum ada sarana kesehatan berjumlah 20.435 desa, yang belum memiliki pasar permanen sebanyak 29.421 desa, serta yang belum dialiri listrik sebanyak 6.240 desa. Rata-rata keluarga miskin di desas tertinggal adalah 46,44% dengan indeks pembangunan manusia desa tertinggal sebesar 66,46.

Untuk mengatasi kesenjangan ini maka perlu dilakukan terebosan dalam bentuk program penataan ruang, penataan pemukiman penduduk, dan penyempurnaan sarana dan prasarana sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu akan mencerminkan distribusi pendapatan yang adil dan merata karena pertumbuhan ekonomi ini bisa saja hanya dinikmati oleh sekelompok kecil masyarakat, terutama di perkotaan, sedangkan masyarakat pedesaan mendapat porsi yang kecil. Berdasarkan data yang ada, di daerah Riau terjadi kesenjangan (disparitas) terutama antar daerah dan sektor serta antar golongan masyarakat. Kesenjangan antar kabupaten/kota paling menyolok pada tahun 2007 adalah antara daerah Kabupaten Bengkalis dan Siak yang tumbuh lebih dari 8% dengan daerah yang lain, misalnya daerah Kabupaten Rokan Hulu yang tumbuh hanya sekitar 6%. Demikian juga kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan serta antar golongan dalam masyarakat. Kesenjangan ini cukup berbahaya karena menyimpan potensi konflik kerusuhan dan kecemburuan sosial yang pada gilirannya membahayakan kestabilan nasional. Akibat lanjut dari kesenjangan ini adalah munculnya daerah-daerah tertinggal dan miskin yang terbelakang dalam pembangunan terutama daerah-daerah di pedesaan.

Kesenjangan di daerah tertinggal ini semakin diperburuk pula karena adanya kesenjangan dalam pembangunan antar sektor, terutama antara sektor pertanian (basis ekonomi pedesaan) dan non-pertanian (ekonomi perkotaan). Adanya daerah-daerah tertinggal ini tidak hanya membawa kemiskinan bagi masyarakat tetapi dalam jangka panjang kesenjangan yang bersifat akumulatif ini akan menyebabkan daerah yang tertinggal akan semakin jauh tertinggal sementara yang maju akan tetap maju dengan percepatan yang semakin sulit dikejar. Hal ini karena adanya perbedaan sumberdaya manusia, pertumbuhan awal dan hasil pembangunan berjalan yang secara akumulatif mendorong pertumbuhan selanjutnya sehingga akselerasi pembangunan di kedua daerah berbeda. Kesenjangan ini hanya dapat diatasi bila ada intervensi pemerintah dengan cara mengontrol daerah tertinggal sehingga basis perekonomian menjadi terangkat untuk memacu pertumbuhan dan bersaing secara lebih fair dengan daerah lain.

Berdasarkan data dari Kantor Pembangunan Masyarakat Desa, pada tahun 2007 di daerah Riau terdapat 471 desa tertinggal. Salah satu

kabupaten yang mempunyai desa tertinggal yang paling banyak adalah Kabupaten Rokan Hulu, yaitu dari 95 desa yang terdapat di daerah ini sebanyak 39 desa diantaranya tergolong desa tertinggal. Banyaknya desa tertinggal dan keluarga prasejahtera di daerah ini merupakan indikasi bahwa pembangunan ekonomi selama ini belum menyentuh rakyat lapisan bawah sehingga dengan adanya krisis menyebabkan daerah-daerah pedesaan yang terpencil menjadi rentan sehingga terpuruk menjadi daerah miskin. Hal ini disebabkan selain oleh karena kebijaksanaan yang salah dan distortif pada masa lalu juga karena kondisi wilayah Rokan Hulu yang luas dan sangat bervariasi.

Banyaknya desa tertinggal ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Beberapa dari daerah miskin ini merupakan sumberdaya alam yang cukup kaya tetapi masyarakat tidak mempunyai kesempatan untuk memanfaatkan kekayaan alam tersebut. Di samping itu, dengan program pemberdayaan masyarakat desa tertinggal ini akan mengurangi ketimpangan pembangunan dan pendapatan antar daerah.

Salah satu cara untuk mengatasi kesenjangan ini adalah dengan program pembangunan ekonomi untuk memberdayakan masyarakat pedesaan. Sesuai dengan ketersediaan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang ada di pedesaan maka program pembangunan ekonomi yang cocok adalah pembangunan ekonomi yang berbasis sumberdaya pertanian pedesaan dan tidak membutuhkan tenaga kerja yang terampil dan berpendidikan tinggi. Program ini dapat berbentuk pembangunan pertanian tanaman perkebunan, tanaman makanan dan hortikultura serta perikanan.